

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu provinsi di kawasan Sumatera juga tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan yang menjadi tantangan pembangunan daerah. Meskipun angka kemiskinan di Sumatera Barat secara umum berada di bawah rata-rata nasional, kondisi ini tidak serta merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah. Ketimpangan antarwilayah antara kawasan perkotaan dan perdesaan, serta antara daerah pesisir dan kepulauan dengan pusat kota, masih menjadi persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun seluruh pemangku kepentingan.¹

Tabel 1.1 Data Persentase Kemiskinan Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Kemiskinan (%)
1	2020	6,6
2	2021	6,9
3	2022	5,9
4	2023	6,0
5	2024	6,1

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Tabel 1.1, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020–2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 tingkat

¹ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Sumatera Barat Maret 2023," BPS Provinsi Sumatera Barat, no. 06 (2023): 1.

kemiskinan tercatat sebesar 6,6 persen, kemudian meningkat menjadi 6,9 persen pada tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat. Selanjutnya, tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,9 persen pada tahun 2022 seiring dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian daerah. Namun, pada tahun 2023 dan 2024 tingkat kemiskinan kembali mengalami peningkatan menjadi 6,0 persen dan 6,1 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat masih menjadi tantangan pembangunan daerah yang memerlukan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.²

Di Provinsi Sumatera Barat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat dan mencapai 76,43 pada tahun 2024, naik 0,79 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, perbaikan IPM tidak selalu diikuti penurunan kemiskinan proporsional di seluruh kabupaten/kota, sehingga muncul ketimpangan distribusi manfaat pembangunan³. Statistik terbaru menunjukkan jumlah penduduk miskin pada September 2024 mencapai 315,43 ribu jiwa atau 5,42 persen, menandakan adanya tantangan serius dalam menghubungkan peningkatan kualitas hidup dengan pengurangan kemiskinan⁴. Fenomena ini mengundang pertanyaan: sejauh mana indikator agregat IPM benar-benar mencerminkan kesejahteraan riil masyarakat, khususnya kelompok rentan, dan

² "Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat, 2025," Badan Pusat Statistik, n.d., 1.

³ Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, "Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024," BPS Sumatera Barat, no. 72 (2025): 1.

⁴ Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Di Sumatera Barat Maret 2023," BPS Provinsi Sumatera Barat, no. 06 (2023): 2.

bagaimana peran instrumen sosial seperti penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dapat mengubah perbaikan IPM menjadi pengurangan kemiskinan yang lebih merata.

Fokus pada konteks Sumatera Barat penting karena provinsi ini menampilkan variasi sub nasional yang signifikan. Beberapa kabupaten/kota menunjukkan perbaikan IPM relatif cepat, sedangkan daerah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. IPM sebagai indikator agregat seringkali menyembunyikan ketimpangan distribusi pembangunan antardaerah⁵. Penelitian lokal menemukan bahwa determinan IPM di Sumatera Barat erat kaitannya dengan alokasi belanja publik dan efektivitas program sosial⁶. Karena IPM dan kemiskinan memiliki keterkaitan erat melalui dimensi kualitas hidup, penting untuk menguji secara empiris hubungan antara IPM, penyaluran dana ZIS, dan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. Analisis ini akan memberikan gambaran apakah peningkatan IPM berdampak langsung terhadap pengurangan kemiskinan, ataukah perlu dukungan instrumen tambahan berupa penyaluran dana ZIS agar manfaat pembangunan dapat lebih merata dan efektif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Zakat, Infak, dan Sedekah berfungsi sebagai mekanisme redistribusi berbasis masyarakat yang memiliki potensi besar dalam mempersempit kesenjangan ekonomi. Jika dimobilisasi secara efektif, penyaluran dana ZIS

⁵ Elza Maryuni, Mahmud, dan Herda Gusvita, "Analisis Tingkat Kemiskinan Dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat," *Jurnal Research Ilmu Pertanian* 2, no. 2 (2022): 165.

⁶ Nichy Oktaviani et al., "Pengaruh Kemiskinan Dan Prevalensi Stunting Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Barat," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 6, no. 3 (2024): 569.

dapat memperluas ruang fiskal sosial non-pemerintah, sekaligus meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat miskin. Akan tetapi, potensi besar ini seringkali belum dimanfaatkan secara optimal, terutama di daerah. Faktor penyebabnya meliputi rendahnya tingkat kolektabilitas, lemahnya tata kelola lembaga zakat, serta kurangnya koordinasi antara lembaga pengelola ZIS dengan program pemerintah.⁷ Dalam konteks ini, penelitian yang mengaitkan kontribusi kuantitatif penyaluran dana ZIS terhadap indikator kesejahteraan lokal seperti IPM dan tingkat kemiskinan menjadi sangat penting untuk memastikan instrumen syariah benar-benar berfungsi secara optimal.

Bukti empiris tentang efektivitas penyaluran dana ZIS masih beragam. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan serta peningkatan pendapatan mustahik, terutama jika disalurkan pada program pemberdayaan seperti modal usaha, pelatihan, dan akses pembiayaan.⁸ Namun, studi lain justru menemukan bahwa kontribusi penyaluran dana ZIS terhadap penurunan kemiskinan agregat tidak signifikan karena keterbatasan skala program dan kualitas pendayagunaan. Secara teoritis, kajian ini berakar pada konsep pembangunan manusia Amartya Sen yang menekankan kapabilitas sebagai inti pembangunan.⁹ Konsep ini sejalan dengan maqashid al-syariah yang menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai

⁷ BAZNAS, "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional," 2023, 5.

⁸ Nurul Hajar, Nurhaeni Putri Amelia, dan Ilham Bin Nasir, "Peran Zakat Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia," *NOMISMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 56.

⁹ Agung Eko Purwana, "Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Justicia Islamica* 11, no. 1 (2014): 101.

tujuan syariah. Keduanya menempatkan kualitas hidup manusia sebagai tujuan pembangunan.¹⁰ Dalam kerangka ini, IPM dapat dipandang sebagai ukuran modern pembangunan manusia, sedangkan penyaluran dana ZIS dapat dilihat sebagai instrumen syariah untuk redistribusi sumber daya guna mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Secara empiris, beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan pengaruh IPM dan ZIS terhadap kemiskinan. Pratama dan Aisyah dalam penelitiannya di Provinsi Bali periode 2018–2021 menemukan bahwa IPM berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan menggunakan Random Effect Model, di mana setiap kenaikan IPM sebesar satu poin akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,2319 persen hasil ini membuktikan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat secara nyata mampu menekan angka kemiskinan.¹¹ Sejalan dengan itu, Munandar, Amirullah, dan Nurochani membuktikan bahwa penyaluran dana ZIS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006–2017, di mana setiap kenaikan penyaluran dana ZIS sebesar satu persen mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 8,189 persen, yang menegaskan bahwa ZIS sebagai instrumen redistribusi syariah memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan apabila dikelola dan disalurkan secara optimal. Namun, bukti empiris serupa untuk Provinsi Sumatera Barat khususnya di level kabupaten/kota dengan data panel jangka panjang masih

¹⁰ Muhamed Umer Chapra, "Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah: Occasional Papers Series-15," no. January 2008 (2024): 121.

¹¹ Fiqri Febrian Pratama dan Siti Aisyah, "Pengaruh IPM, Jumlah Penduduk Dan Upah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Bali Tahun 2018-2021," 23, no. 1 (2023).

sangat terbatas, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

Urgensi akademik penelitian ini terletak pada kontribusi metodologis dan empiris. Dengan menghubungkan IPM dan penyaluran dana ZIS dalam model kuantitatif, penelitian ini dapat menjawab pertanyaan kausal tentang peran instrumen syariah dalam pengurangan kemiskinan. Analisis ini akan memanfaatkan data IPM dan kemiskinan per kabupaten/kota serta data pengumpulan dan penyaluran dana ZIS dari lembaga resmi di Sumatera Barat. Penggunaan data panel memungkinkan identifikasi hubungan jangka panjang dan pola dinamis. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur pembangunan ekonomi Islam, yang masih relatif terbatas dalam penelitian kuantitatif pada level sub-nasional. Selain itu, temuan empiris dari Sumatera Barat dapat memberikan perbandingan penting bagi daerah lain dengan karakteristik sosial ekonomi serupa. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini mencakup aspek akademis sekaligus kebijakan praktis yang aplikatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat?
2. Apakah Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat?

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat?

C. Batasan Masalah

Dari latar belakang dan rumusan masalah di atas, didapatkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dibatasi pada wilayah Provinsi Sumatera Barat, dengan unit analisis kabupaten/kota sebagai fokus pengamatan.

2. Periode Waktu Penelitian

Data yang digunakan dibatasi 10 tahun terakhir (2015–2024), disesuaikan dengan ketersediaan data IPM, Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dan tingkat kemiskinan

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas didapatkan beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

3. Mengetahui bagaimana Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) secara bersama sama memengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian ekonomi Islam dan pembangunan manusia. Dengan mengaitkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) terhadap tingkat kemiskinan, penelitian ini memperkaya literatur mengenai pembangunan berbasis keadilan sosial dan maqashid al-syariah. Penelitian ini juga dapat memperluas pemahaman akademis mengenai efektivitas instrumen syariah (zakat, infak, sedekah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat sub nasional. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh peneliti lain yang ingin mengembangkan studi serupa dengan pendekatan metodologi berbeda maupun pada wilayah kajian yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, khususnya melalui peningkatan IPM

di sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Bagi lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZ, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengoptimalkan penyaluran dana ZIS agar lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat miskin. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran ZIS sebagai instrumen sosial Islam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah dan tersusun secara sistematis, maka diurutkan berdasarkan bab-bab dan beberapa sub bab. Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang menjadi panduan dalam membaca penelitian ini.

BAB II : Landasan Teori

Menguraikan teori-teori dan konsep yang relevan dengan penelitian, seperti konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) serta teori kemiskinan dalam perspektif ekonomi konvensional maupun Islam. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang mendukung analisis, serta

menyusun kerangka pemikiran yang menjadi dasar bagi pengolahan data dalam penelitian ini.

BAB III : Metodologi Penelitian

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian kuantitatif, lokasi dan periode penelitian di Provinsi Sumatera Barat, serta jenis dan sumber data. Bab ini juga menguraikan variabel penelitian, teknik pengumpulan data dari BPS, BAZNAS, dan sumber resmi lainnya, serta teknik analisis data yang digunakan seperti regresi panel dan uji statistik yang relevan.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Memaparkan hasil analisis empiris mengenai hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat. Temuan tersebut kemudian dianalisis secara mendalam dengan mengaitkannya pada teori, hasil penelitian terdahulu, serta perspektif Islam melalui maqashid al-syariah.

BAB V : Penutup

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang secara ringkas menjawab rumusan masalah. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada pemerintah daerah, lembaga zakat, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk meningkatkan efektivitas sinergi antara pembangunan manusia dan belanja sosial syariah dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan.